



**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN
ASET BARANG MILIK NEGARA YANG TERCATAT DAN DIKELOLA
OLEH DUA SATUAN KERJA PADA JAJARAN KEPOLISIAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR, DI TINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG BARANG MILIK
NEGARA**

(Studi Pada Satuan Brimob Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur)

SKRIPSI

Diajukan dan akan di Pertanggungjawabkan Secara Ilmiah, Guna Memenuhi
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Bidang Hukum

Oleh:

ANTONIO CORTEREAL

NIM: 2019110955

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2024

LEMBAR PERSETUJUAN



KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN
ASET BARANG MILIK NEGARA YANG TERCATAT DAN DIKELOLA
OLEH DUA SATUAN KERJA PADA JAJARAN KEPOLISIAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR, DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG BARANG MILIK NEGARA
(Studi Pada Satuan Brimob Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

ANTONIO CORTEREA

NIM: 2019110955

Disetujui

Pembimbing I

Yohanes Pande, SH., MH
NIDN: 0807127403

Pembimbing II

Christina Bagenda, SH., MH
NIDN: 08230366701

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Flores**

Christina Bagenda, SH., MH
NIDN: 08230366701

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**

Hendri Kus Haipon, SH., MHum
NIDN: 0812117801

PENGESAHAN
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN
ASET BARANG MILIK NEGARA YANG TERCATAT DAN
DIKELOLA OLEH DUA SATUAN KERJA PADA JAJARAN
KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, DI TINJAU
DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG BARANG MILIK NEGARA
(Studi Pada Satuan Brimob Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur)
SKRIPSI






Telah Dipertanggungjawabkan Di Hadapan Dewan Penguji Skripsi Pada
Tanggal 13 Februari 2024

DISUSUN OLEH:

ANTONIO CORTERREAL
NIM: 2019110955

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN
DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

- | | | | |
|--|--------------|---|---|
| 1. Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum. | (Ketua) | 1 |  |
| 2. Maria A. Liza Quintarti, S.H., M.Hum. | (Sekretaris) | 2 |  |
| 3. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum. | (Anggota) | 3 |  |
| 4. Christina Bagenda, S.H., M.H. | (Anggota) | 4 |  |
| 5. Yohanes Pande, S.H., M.H. | (Anggota) | 5 |  |

MENGETAHUI:

DEKANEAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES

CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

HENDRIUS HAIBON, S.H., M.HUM
NIDN : 0812117801

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Flores. Tuntunan dan Anugerah Sang Pencipta yang patut penulis syukuri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan Aset Barang Milik Negara Yang Tercatat Dan Dikelola Oleh Dua Satuan Kerja Pada Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Barang Milik Negara”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari usaha, bimbingan, dan doa serta dukungan yang tidak ternilai harganya dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Flores, beserta jajaran yang telah memberikan perhatian besar terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan di Universitas Flores.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum. beserta jajaran pada tingkat Program Studi yang telah begitu baik dan setia dalam pelayanan selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Bapak Yohanes Pande, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I, Terima kasih untuk bimbingan, arahan dari sisi substansi, motifasi dan nasehat- nasehat yang sangat berharga yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis mampu menyusun skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Christina Bagenda, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing II, Terima kasih atas waktu dan kesediaannya serta segala masukan yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi Penulis.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Flores yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini. Engkaulah para Pelita, Penerang dalam Gulita, Jasamu Tiada Nilai dan Batasnya.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan yang lainnya.
7. Bapak Kapolda NTT, Bapak Danki Mako Brimob, melalui unit Satuan Kerja Maku Brimob NTT, Satuan Yanma dan Operator Wilayah serta jajaran KPKNL Kupang yang telah memberi dukungan, berupa data maupun dukungan moril yang tidak henti-hentinya memotifasi penulis untuk tetap berupaya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, sejak tahapan pra penelitian sampai dengan pasca penelitian.
8. Seluruh Sahabat dan Saudara seperjuangan, terkhusus angkatan 2019.

Penulis hanya mampu memberikan untaian kata terima kasih dan doa yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Kiranya kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas dengan kebaikan dan berkat yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan teman-teman yang berkecimpung dalam dunia hukum sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah dalam berpikir.

Penulis menyadari bahwa substansi dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dalam konteks keilmiahannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan, agar keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ende, Februari 2024


ANTONIO CORTEREAL
NIM: 2019110955

Motto:

Memahami **HUKUM**, Menciptakan **KEDAMAIAN**
dan Menuai **MANFAAT**

By

Antonio

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANTONIO CORTERREAL

NIM : 2019110955

Fakultas : Hukum Program

Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, 08 Januari 2024



ANTONIO CORTERREAL
NIM: 2019110955

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Ruang Lingkup Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian	10
1.6. Lokasi Penelitian	12
1.7. Sistematika Penulisan	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Kepastian Hukum	15
2.2. Kepemilikan Aset	16
2.3. Pengelolaan Barang Milik Negara	19
2.4. Aplikasi Sakti	22
BAB III: KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN ASET BARANG MILIK NAGARA YANG TERCATAT DAN DIKELOLA OLEH DUA SATUAN KERJA DI JAJARAN KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.....	29
3.1. Gambaran Umum Terkait Barang Milik Negara	25

3.2. Posisi Kasus Dualisme Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	27
3.3. Tugas Dan Fungsi Pelayanan Masyarakat (Yanma) Pada Satuan Kerja (Satker) Brimob Polda Nusa Tenggara Timur	29
3.4. Manfaat Pengembangan Pembangunan Maupun Pemanfaatan Suatu Aset	35

**BAB IV: FAKTOR PENENTU KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
KEPEMILIKAN ASET BARANG MILIK NEGARA YANG
TERCATAT DAN DIKELOLAH OLEH DUA SATUAN KERJA DI
JAJARAN KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
.....**

37

4.1. Tidak Dilakukan Langkah Mengambil Alih Aset Yang Dikelola Oleh Satuan Kerja Yanma Polda NTT	37
4.2. Kesalahan Pencatatan oleh Dua Satker Di Lingkup Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	45

BAB V: PENUTUP

54

5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran-saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

ANTONIO CORTEREAL, (NIM: 2019110955), Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan Aset Barang Milik Negara Yang Tercatat Dan Dikelola Oleh Dua Satuan Kerja Pada Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Barang Milik Negara (Studi Pada Satuan Brimob Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur). Dibawah bimbingan Bapak Yohanes Pande, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Christina Bagenda selaku Dosen Pembimbing II.

Kewajiban pemerintah daerah untuk mengamankan barang milik daerah telah diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Sedangkan pada Pasal 3 menjelaskan: Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, **kepastian hukum**, transparansi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan Aset Barang Milik Negara Yang Tercatat dan Dikelolah Oleh Dua Satuan Kerja Di Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Barang Milik Negara; Apakah Faktor Penentu Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan Aset Barang Milik Negara Yang Tercatat dan Dikelolah Oleh Dua Satuan Kerja Di Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Barang Milik Negara.

Penelitian ini dilakukan di Unit Satuan Kerja Maku Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Perolehan data dilakukan melalui teknik wawancara, pengumpulan data dan observasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya Kepemilikan Aset Barang Milik Negara yang tercatat dan dikelola oleh dua Satuan Kerja pada Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, yakni antara Satuan Kerja Maku Brimob dan Yanma Kepolisian Daerah (Polda) NTT, yang diakibatkan karena kesalahan pengimputan oleh operator pada masing-masing Satua Kerja, sehingga bentuk penyelesaian untuk memperoleh Kepastian Hukum dengan cara saling bersinergi dan berkoordinasi dengan menempuh solusi dalam upaya untuk menyelesaikan masalah dimaksud. Hambatan yang timbul dari masalah tersebut, karena tidak dilakukan langkah mengambil alih aset yang dikelola oleh masing- masing Satuan Kerja serta kesalahan pencatatan oleh dua satker di lingkup Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kepemilikan Aset, Satuan Kerja.

ABSTRACT

ANTONIO CORTEREAL, (NIM: 2019110955), Legal certainty regarding the ownership of state property assets which are registered and managed by two work units in the East Nusa Tenggara Regional Police, viewed from Government Regulation Number 27 of 2014 concerning State Property (Study of Units East Nusa Tenggara Regional Police Mobile Brigade). Under the guidance of Mr Yohanes Pande, SH.,MH as Supervisor I and Mrs Christina Bagenda, SH.,MH as Supervisor II.

The obligation of regional governments to secure regional property is regulated in Article 42 paragraph (2) Government Regulation Number 27 of 2014, including physical security, administrative security and legal security. Meanwhile, Article 3 explains: Management of State/Regional Property is carried out based on functional principles, legal certainty, transparency, accountability and certainty of value.

The main problem in writing this thesis can be formulated as follows: How is legal certainty regarding the ownership of state-owned assets registered and managed by two work units in the East Nusa Tenggara Regional Police in terms of government regulation number 27 of 2014 concerning state-owned goods; What are the Determining Factors for Legal Certainty in Ownership of State Property Assets which are Registered and Managed by Two Work Units in the East Nusa Tenggara Regional Police, in View from Government Regulation Number 27 of 2014 concerning State Property.

This research was conducted at the Maku Brimob Work Unit of the East Nusa Tenggara Regional Police (Polda). The research method used is empirical legal research using a sociological juridical approach. Data collection was carried out through interview techniques, data collection and observation. The data obtained was then processed and analyzed descriptively.

The research results show that there is ownership of State Property Assets which are recorded and managed by two Work Units in the East Nusa Tenggara Regional Police, namely between the Maku Brimob Work Unit and the NTT Regional Police Yanma (Polda), which is caused by an error in the calculation by operators in each -each Work Unit, so that the form of solution to obtain Legal Certainty is by synergizing and coordinating with each other by adopting solutions in an effort to resolve the problem in question. Obstacles arising from this problem were due to failure to take steps to take over assets managed by each Work Unit as well as recording errors by two work units within the East Nusa Tenggara Regional Police.

Keywords: Legal Certainty, Asset Ownership, Work Unit.